

NETRALITAS BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK DALAM KELINDAN POLITIK PRAKTIS PEMILU 2024 DI KABUPATEN SUMENEP

Hairul Anwar¹, Mulyadi², Helmi³

¹Institut Kariman Wirayudha

Email: hairulanwarinkadha@gmail.com

²STKIP PGRI Sumenep

Email: mulyadi@stkipgrisumenep.ac.id

³Bapedda Sumenep

Email: humashelmi@gmail.com

Abstrak

Netralitas birokrasi menjadi salah satu gagasan Weber, dengan harapan agar para birokrat dan birokrasinya dapat beroperasi secara profesional. Selain itu, mereka dapat mengambil tanggung jawab penuh atas tugas dan tanggung jawab mereka. Sejak reformasi, persoalan netralitas birokrasi telah mendapat perhatian khusus dari para pemerhati birokrasi di Indonesia, tujuan yang sesuai dengan harapan Weber adalah untuk mengetahui bagaimana mencapai mesin pemerintahan yang hakikatnya birokratis, yang masih menyisakan sejumlah keraguan, karena kemungkinan tidak terpenuhinya seluruh asumsi yang mendasari terbentuknya Negara. Negara membentuk suatu sistem ketatanegaraan yang bertujuan melayani kepentingan rakyat, yang disebut birokrasi pemerintahan. Birokrasi sebagai organisasi modern yang konsep dasarnya dikembangkan pertama kali oleh Max Weber, yaitu dipercayakan sepenuhnya kepada pegawai negeri sipil yang memenuhi beberapa syarat tertentu dalam menjalankan sistem administrasi pemerintahan. Seperangkat ciri-ciri ideal (tipe ideal) birokrasi yang rasional secara hukum, sehingga memungkinkan untuk ditransformasikan menjadi instrumen yang mampu mewujudkan tujuan organisasi birokrasi secara efisien dan efektif. Meski penerapannya menuai kritik dari banyak pakar dan pakar yang bijak, namun berpotensi menjadi koordinator profesional dan pelayan bagi semua kalangan, bukan hanya sebagian, fraksi, atau kepentingan sementara, terlebih di kabupaten Sumenep dalam rangka menyambut pemilu tahun 2024.

Kata kunci: Netralitas, Birokrasi, Pelayanan Publik, Pemilu

Abstract

Bureaucratic neutrality became one of Weber's ideas, hoping that the bureaucrats and their bureaucracy could operate professionally. Besides, they can take full responsibility for their duties and responsibilities. Since the reforms, the issue of bureaucratic neutrality has attracted special attention from bureaucracy observers in Indonesia, the objective that corresponds to Weber's expectations is to find out how to a government machinery that is in fact bureaucratized, which still leaves a number of doubts, due to the possibility that the entire assumption underlying the formation of the State will not be fulfilled. The state forms a system of statehood aimed at serving the interests of the people, called government bureaucracy. The bureaucracy is a modern organization whose basic concept was first developed by Max Weber, namely entrusted entirely to civil government officials who meet certain conditions in running a system of government administration. A set of ideals of bureaucracy that is legally rational, thus enabling it to be transformed into instruments capable of realizing the purposes of bureaucratic organization efficiently and effectively. Although its implementation has received criticism from many wise experts and experts, it has the potential to be a professional coordinator and a servant of all, not just partial, fractional, or temporary interests, especially in the Sumenep district in order to welcome the 2024 elections.

Keywords: Neutrality, Bureaucracy, Public Service, Elections

Pendahuluan

Birokrasi modern yang ideal seperti yang dicitrakan oleh Weber dan birokrasi yang netral seperti yang dicitrakan dan diwacanakan oleh Hegel, ternyata masih sebuah obsesi dalam pelaksanaannya. Demikian itu oleh karena lembaga birokrasi merupakan suatu bentuk dan tatanan yang mengandung struktur dan kultur. Struktur mengetengahkan susunan dari suatu tatanan, dan kultur mengandung nilai (values), sistem, dan kebiasaan yang dilakukan oleh para pelakunya yang mencerminkan perilaku dari sumber daya manusianya.

Ketentuan bagi PNS untuk bersikap netral juga diatur dalam Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Demikian dalam rangka merespon reformasi politik, dalam konteks birokrasi, perangkat peraturan perundangan di revisi untuk menyesuaikan dengan keadaan zaman.

Pada pasal 3, ayat 2 menyebut bahwa pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, dengan disahkannya UU No 32 Tahun 2004 itu, maka pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung.

Realitas menunjukkan dalam beberapa pemilu, terutama pilkada yang berlangsung, marak terjadi politisasi birokrasi seperti dalam pilkada beberapa kabupaten/kota yang harus diulang berdasarkan keputusan MK karena terbukti keterlibatan birokrasi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masih ada persoalan dalam reformasi birokrasi yang dicanangkan awal reformasi yang menghendaki birokrasi menjadi modern, dan netral.

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimana Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Netralitas Birokrasi Dan Pelayanan Publik Dalam Kelindan Politik Praktis Pemilu 2024 Di Kabupaten Sumenep ? Dengan tujuan mewujudkan Netralitas Birokrasi Dan Pelayanan Publik Dalam Kelindan Politik Praktis Pemilu 2024 Di Kabupaten Sumenep.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan eksplanatori. Penelitian deskriptif dikutip oleh Mohammad Nazir sebagai penelitian deskriptif, yang meneliti masalah-masalah dalam masyarakat dan prosedur hubungan, kegiatan, dan efek dari proses dan fenomena yang sedang berlangsung.

Fokus penelitian ini adalah tentang netralitas birokrasi dan pelayanan public dalam kelindan politik praktis di Sumenep. Kajian ini juga bersifat literal, dengan menggunakan kajian literatur dan materi dokumenter dari media cetak dan online untuk memvalidasi data kajian.

Hasil dan Pembahasan

Birokrasi dan Pelayanan Publik

Pada tinjauan sederhana, pada dasarnya netralitas birokrasi adalah keniscayaan, berikut dimaknai sebagai ketidakberpihakan birokrasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya terhadap kepentingan kelompok atau golongan tertentu yang berkuasa dalam pergulatan politik praktis. Netralitas birokrasi dalam kata lain, birokrasi hanya memberikan pelayanan kepada kepentingan negara dan masyarakat.

Gambaran birokrasi yang berposisi netral ini merupakan gambaran yang ideal sebagaimana yang diidealisasikan oleh Max Weber. Gambaran paripurna birokrasi tersebut akan lebih terasa komprehensif, apabila berbagai pandangan tentang kedudukan, fungsi dan peran birokrasi dalam mengurus negara mampu diwujudkan.

Dengan perkataan lain, bagaimanakah hubungan antara negara, birokrasi dan masyarakat dalam tataran teoritis. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kita lebih memiliki wawasan yang lebih luas dalam mengkaji dan meninjau kedudukan birokrasi tersebut.

Dalam perjalannya, hal itu memuncak pada pertengahan tahun 1997 ketika terjadi krisis ekonomi dan runtuhnya penguasa Orde Baru. Birokrasi pemerintah mengalami suatu krisis kepercayaan yang mendalam, seperti yang diungkapkan oleh Kumorotomo (2005:3) berikut: "salah satu masalah mendasar yang dihadapi

oleh Pemerintah Indonesia sebelum dan setelah terjadinya krisis ekonomi ialah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik dan sistem pemerintahan pada umumnya. Setelah melihat bahwa birokrasi selama ini hanya dijadikan sebagai alat politik bagi rejim yang berkuasa. Rakyat kini sulit untuk menghargai apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, birokrat, atau unsur-unsur lain yang terdapat dalam birokrasi publik."

Kondisi ini menjadi starting point bagi munculnya birokrasi pada masa Reformasi. Birokrasi pemerintah dihadapkan pada banyak dan besarnya tuntutan dan harapan Masyarakat untuk keluar dari persoalan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada birokrasi.

Profesionalisme birokrasi, birokrasi yang bebas dari KKN, adanya akuntabilitas dalam pelayanan, netralitas birokrasi, dan sebagainya, menjadi nuansa yang dituntut oleh Masyarakat terhadap birokrasi pemerintah. Tetapi apa mau dikata, perubahan yang diharapkan terjadi dalam prakteknya belum terwujud. Birokrasi pada masa Reformasi, menurut berbagai pengakuan para pakar yang mengkaji tentang itu, masih saja menampakkan struktur dan sistem birokrasi pemerintah pada masa feodal, kolonial, ataupun pada masa Orde Baru (Dwiyanto, 2002; Prasajo, 2004; Triguno, 2005).

Sehingga persoalan-persoalan yang telah melekat pada birokrasi pemerintah pada masa-masa tersebut, kembali muncul lagi pada masa Reformasi ini.

Jadi secara umum berdasarkan tinjauan kesejarahan dapat terlihat bahwa dalam praktiknya pentingnya peran birokrasi pemerintah tidak diimbangi oleh kinerja yang baik dalam menjalankan perannya, dan factor sejarah pembentukan birokrasi pemerintah dari waktu ke waktu, banyak mempengaruhinya.

Konsep Netralitas Birokrasi dan Pelayanan Publik

Lebih khusus, Birokrasi sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan kekuasaan. Demikian pula pada masa pemerintahan kolonial, birokrasi dipergunakan sebagai instrumen bagi kepentingan kekuasaan. Bahkan, praktik birokrasi, sebagaimana kita ketahui bersama, bukanlah sesuatu fenomena atau hal baru dalam perkembangan sejarah masyarakat karena birokrasi telah ada dalam bentuknya yang sederhana pada jaman Mesir dan Romawi. Tetapi dalam perkembangan Masyarakat kontemporer, birokrasi telah menjadi satu lembaga yang dominan, dan sesungguhnya merupakan simbol utama yang menggambarkan lahirnya masyarakat modern.

Apa yang dikatakan oleh Blau dan Meyer (2000, 13) berikut dapat mempertegas hal tersebut. "...dalam masyarakat modern, jika kita tidak memahami bentuk lembaga birokrasi, maka kita tidak dapat memahami kehidupan sosial Masyarakat modern dewasa ini."

Pernyataan Blau dan Meyer di atas jika diinterpretasikan lebih jauh

menunjukkan bahwa dalam masyarakat modern apabila suatu masyarakat itu semakin berkembang besar, dan bermunculan berbagai urusan dan masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang semakin kompleks dan penting dan perlu ditangani oleh negara, serta terbentuknya organisasi-organisasi yang semakin besar, maka keberadaan birokrasi menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari untuk mencegah terjadi kekacauan yang merugikan.

Birokrasi terkontaminasi oleh pengaruh politik elit atau partai yang berkuasa atau istilah Marx, kelas yang berkuasa. Model birokrasi yang netral menurut pemikiran Weber, sejalan dan dapat kita telusuri dalam pandangan filsafat Hegelian yang memandang negara sebagai suatu elemen netral yang seolah-olah terpisah dari kehidupan masing-masing individu warga masyarakat.

Dalam pandangan Hegel, masyarakat sipil yang meliputi semua hubungan keluarga dan ekonomi, yang berada di luar struktur kekuasaan yuridis dan politik negara, merupakan samudera egoisme tanpa batas, tempat setiap orang saling beradu kekuatan dengan sesamanya. Dengan perkataan lain, bahwa kehidupan masyarakat ditandai oleh aneka individu yang memiliki kepentingan subyektif sendiri-sendiri (kepentingan partikular).

Masing-masing individu akan berjuang untuk mencapai kepentingan sendiri-sendiri. Alhasil, bila tidak dikendalikan oleh negara, maka antar

individu akan terjadi kekacauan karena masing-masing individu warga akan memperjuangkan kepentingan subyektifnya melawan kepentingan subyektif warga lainnya.

Dalam posisi ini, menurut Hegel, negara tampil sebagai entitas ideal yang mengarahkan segala kepentingan individu warga yang irasional menjadi rasional. Oleh karena itu, negara tidak saja terpisah dari kehidupan masing-masing individu warga negara, tetapi ia juga secara logis mengatasi semua kepentingan individu, sebab negara dipandang sebagai sebuah lembaga yang mengatasi dan lebih sempurna dari individu warga masyarakat.

Kesempurnaan dan kekuatan negara tersebut terletak dalam kesatuan dari tujuannya yang bersifat universal, yaitu merepresentasikan dan memperjuangkan kepentingan umum masyarakat. Sehingga menurut Hegel, negara merupakan penjelmaan dari kepentingan umum masyarakat (Budiman: 1996,4-5). Negara dipandang sebagai suatu universalitas yang berdiri di atas seluruh kepentingan individu, yang menuntun individu warga meninggalkan libido egoisme dan berproses menjadi manusia ideal yang tinggal dalam masyarakat.

Pandangan seperti ini, jika kita mau menengok ke belakang, sebenarnya sudah lama muncul sejak Zaman Yunani Kuno. Plato dan Aristoteles memandang kekuasaan yang besar pada negara adalah mutlak untuk mengendalikan kelirisan individu. Negara harus mampu menjinakkan mereka dan memaksa

mereka mengejar nilai-nilai yang rasional.

Kepentingan masyarakat yang pada gilirannya melahirkan equilibrium. Logika berpikir teori ini harus dipahami dengan asumsi telah tumbuhnya civil society yang mampu mengimbangi kekuasaan negara. Asumsi yang mendasari adalah bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara.

Bila negara dikuasai oleh suatu kelompok masyarakat tertentu, adalah logis bila negara dan birokrasinya melayani kepentingan kelompok tersebut. Akan tetapi, menurut Kaum Pluralis, negara tetap tidak berperilaku semena-mena menindas kepentingan kelompok lain yang tidak berkuasa. Negara tetap membutuhkan dukungan kelompok tersebut untuk memperteguh dan melestarikan kekuasaannya dalam jangka panjang.

Dengan demikian, walaupun melayani kepentingan kelompok tertentu, negara harus juga mengakomodasi kepentingan kelompok lain, dengan konsekuensi mereduksi kepentingan kelompok yang dilayaninya. Jadi, negara bukanlah sekumpulan nilai-nilai moral yang absolut, sebagaimana pemikiran Hegelian, melainkan wahana pertarungan politik tempat setiap kekuatan politik dalam masyarakat saling bersaing menguasai negara dan elit birokrasinya. Kadang-kadang, negara dan elit birokrasinya dikuasai oleh kelas masyarakat tertentu, di lain waktu kelas

masyarakat yang berhasil menguasai birokrasi negara.

Negara dan birokrasinya juga dapat dikuasai bersama-sama melalui kompromi kepentingan politik. Artinya, tidak ada satu kelompok pun yang secara absolut mampu menguasai birokrasi, akibatnya negara tidak bisa secara total mengabdikan pada kepentingan kelompok tertentu. Hal itu disebabkan karena adanya kepentingan kelompok-kelompok lain yang mengawasi keberpihakan negara.

Oleh karena itu, netralitas birokrasi dalam konteks pemikiran kaum Pluralis adalah merupakan hasil dari proses bargaining antar berbagai kepentingan menuju keseimbangan yang memuaskan semua kelompok masyarakat.

Selain pandangan dan teori tentang netralitas birokrasi di atas, sebagai bahan untuk wawasan pemikiran tentang birokrasi, maka perlu pula kita melihat pemikiran lain tentang keberpihakan birokrasi atau ke-tidaknetralitas-an birokrasi. Pemikiran ini lahir dari Karl Marx.

Sebuah kredo yang terkenal Hobbes yang berkaitan dengan pentingnya negara adalah *homo homini lupus*, dimana manusia dianggap dapan 'mencelakakan' sesamanya dengan cara-cara yang tidak beradab. Untuk itu, mereka, khususnya Hobbes, memberikan justifikasi rasional pada kekuasaan negara dengan menyandarkan logikanya pada Sejarah perkembangan masyarakat negara (Hariandja:2003).

Oleh karena itu, jika kita menyelami pemikiran Hegel dan para pemikir sebelumnya hingga masa Aufklärung, menegaskan bahwa negara yang dianggap memiliki kekuasaan dan nilai-nilai moral yang utama, harusnya berdiri netral di tengah-tengah individu warga masyarakat yang memiliki beragam kepentingan yang subyektif.

Dalam kondisi seperti itu, hubungan antara negara dan individu warga masyarakat, muncullah institusi lain, yakni birokrasi pemerintah. Institusi ini menurut Weber dan Hegel merupakan medium yang menghubungkan atau menjembatani antara kepentingan subyektif (partikular) individu dengan kepentingan umum negara (dalam Thoaha: 2003,23).

Pada satu sisi, birokrasi harus mampu menjembatani beragam individu agar kepentingan partikularnya tidak menjadi korban bagi negara dalam mencapai kepentingan umum. Sementara pada sisi lain, birokrasi harus menjembatani kepentingan umum negara itu sendiri agar tidak menjadi korban dari aneka individu yang memperjuangkan kepentingan partikularnya sendiri.

Namun, dalam netralitas tersebut, negara dan birokrasi berkuasa mutlak atau absolut atas individu dan masyarakat. Kondisi seperti ini, peluang untuk lahirnya negara otoritarian dan/atau totalitarian, yang merefeksikan negara sebagai suatu totalitas hidup masyarakat dapat terjadi.

Model netralitas birokrasi yang lain, secara teoritis dikembangkan oleh penggagas Teori Negara Pluralis. Menurut kelompok Pluralis meninjau peran dan kedudukan netralitas birokrasi berasal dari persinggungan berbagai yang ada dalam masyarakat, termasuk lembaga negara akan didominasi oleh kelas dominan yang ada dalam masyarakat, yakni kelas kapitalis dalam sebuah system masyarakat kapitalisme. Dengan demikian, negara tidak lain hanyalah alat bagi kaum kapitalis (Albrow: 1970; Budiman: 1996).

Birokrasi yang merupakan institusi yang diperlukan untuk melaksanakan kekuasaan politik negara, dalam posisi ini, tidak lain hanyalah sebuah institusi yang lebih banyak berfungsi sebagai instrumen politik untuk melakukan eksploitasi dan penindasan dari kaum kapitalis terhadap kaum proletar.

Namun, dalam pemikiran Marx, suatu ketika situasi ini akan berbalik, di mana kaum proletar yang tertindas akan melakukan perlawanan secara revolusioner kepada kaum kapitalis yang berkuasa, termasuk dalam birokrasi, sehingga menghancurkan tatanan sistem kapitalisme yang ada, dan pada saat itu, birokrasi sebagai alat negara akan lenyap pula atau tidak diperlukan lagi karena birokrasi tidak lebih dari sekedar perluasan kekuasaan negara.

Dengan perkataan lain, birokrasi merupakan institusi yang bersifat parasit dan menempel pada kekuasaan negara yang didominasi oleh kelas kapitalis. Marx tidak mempercayai bahwa negara

sebagai instrument netral yang berdiri di atas seluruh kepentingan masyarakat. Negara dan birokrasinya selalu menjadi alat memperjuangkan kepentingan kelompok masyarakat tertentu, yaitu kaum kapitalis.

Oleh karena itu, lebih lanjut Marx berpandangan bahwa perlu dihapuskan system kapitalisme di dunia, karena hanya bersama hancurnya kapitalisme, tidak ada diperlukan lagi sarana-sarana penindas yang digunakan oleh kaum kapitalis, yaitu negara dan birokrasinya. Yang dibutuhkan adalah masyarakat tanpa kelas dan tanpa perlu adanya birokrasi (Albrow: 1970 ; Budiman: 1996; Hariandja: 2003; Mindiarti: 2007).

Jadi pemikiran tentang netralitas dan keberpihakan birokrasi, dalam tataran teoritis, sudah menjadi polemik yang serius, terutama antara Kelompok Hegelian dan Kelompok Marxis. Kedua belah pihak, masing-masing memiliki pandangan tersendiri, namun dapat kita lihat bahwa semuanya itu terjadi melalui suatu proses yang dinamis dalam kehidupan masyarakat modern.

Suatu saat birokrasi dapat netral, suatu saat bisa berpihak, dan suatu saat birokrasi pun bisa tidak dibutuhkan lagi karena anggapan bahwa masyarakat telah mampu mengurus urusan dan masalah dalam kehidupannya.

Kelindan Politik Birokrasi Sumenep

Mengacu lebih dalam pada gagasan teoritis di atas, kita bisa mengetahui bahwa birokrasi, selain merupakan instrumen penting yang menjembatani

hubungan negara dan masyarakat, juga menjelaskan bahwa posisinya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hal mengurus urusan negara dan Masyarakat adalah hal yang penting pula.

Di Sumenep, birokrasi adalah instrumen penting, tidak terbantahkan. Namun, hal yang menarik yang perlu ditinjau, bahwa bagaimana posisi birokrasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan mengurus urusan negara dan masyarakat dalam kelindan politik praktis.

Telah banyak kajian dan penelitian yang dilakukan tentang posisi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan atau mengurus urusan negara dan Masyarakat menunjukkan bahwa birokrasi Indonesia selalu menjadi mesin politik kekuasaan, lebih-lebih dalam pemilu.

Akhirnya, birokrasi di Sumenep dalam praktiknya susah terhindarkan atas kecenderungan tidak netral, birokrasi selalu berpihak pada penguasa (pemerintah) yang berkuasa beserta kelompoknya. Lebih jauh lagi, birokrasi pemerintah belum ditempatkan pada posisi, fungsi dan perannya sebagai sebuah organisasi atau institusi yang netral yang mengurus negara secara profesional dan tidak diskriminatif secara politis atau apolitis.

Sehubungan dengan hal demikian tadi, sejatinya birokrasi menurut Rozi (2006), relatif menjadi instrumen politis atau alat untuk mencapai logika kekuasaan, yaitu mendapatkan,

meningkatkan, memelihara, dan memperluas kekuasaan aktor, elit atau faksi politik tertentu. Hal yang berbeda dengan idealisasi Weber terhadap pemikiran netralitas birokrasinya.

Dalam kacamata ke-Indonesia-an, kecenderungan praktik birokrasi Indonesia yang tidak netral tersebut, sudah tergambar mulai Pemerintahan Indonesia terbentuk, Ketika masa Orde Lama. Pada tahun 1945, Ketika maklumat X dari Mohammad Hatta, selaku Wapres dikumandangkan pada tanggal 16 Oktober 1945, berdirilah banyak partai politik.

kemudian dalam perjalanan dan perkembangannya, cabinet kemudian terisi oleh elit-elit dari partai politik tersebut. Sehingga secara nyata, kehadiran partai politik dalam birokrasi di Indonesia mulai terjadi sejak saat itu. Dengan perkataan lain, bahwa politisasi birokrasi terjadi sejak elit partai politik menjadi menteri dan memimpin kementerian dalam susunan kabinet yang ada.

Dalam posisi perannya yang besar dan mutlak tersebut, pejabat eksekutif kadang tidak terlalu mempertimbangkan faktor kompetensi dan komitmen calon birokrat, tetapi lebih mempertimbangkan jasa-jasanya. Akibatnya, elit-elit politik yang pernah berjasa kepadanya yang menjadi pilihan untuk membantu dalam pemerintahan.

Setidaknya, intervensi partai politik yang berkuasa, terhadap penentuan jabatan tersebut sangat kuat dilakukan, sehingga menimbulkan konflik internal

dalam birokrasi antara individu-individu yang sudah berkarier lama dalam birokrasi dengan pejabat yang menduduki jabatan tersebut. Politisasi birokrasi, akhirnya tumbuh subur dalam birokrasi pemerintahan Indonesia.

Politisasi birokrasi ini, tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat saja, tetapi di beberapa daerah juga terjadi. Birokrasi dijadikan rebutan oleh partai politik. Implikasinya, sampai pada tingkat daerah posisi jabatan dalam birokrasi dipegang pula oleh partai politik yang berkuasa di pemerintah pusat.

Kekuasaan yang mutlak dan tidak diperebutkan secara teratur, benar dan kompetitif, cenderung mengalami pembusukan dalam birokrasi pemerintah, dengan indikasi terjadinya diskriminasi, kolusi, nepotisme dalam rekrutmen pegawai, hambatan jenjang karier bagi non-partisan, intervensi parpol dalam hal siapa yang mendapat kemudahan, kedudukan dan hambatan pelayanan publik, penggunaan fasilitas, dan dana program negara untuk kepentingan politik tertentu.

Birokrasi menjadi "sapi perahan" atau alat partai politik untuk mencapai tujuannya. Birokrasi cenderung terkena Parkinsonisasi, yaitu proses menjadikan fungsi birokrasi untuk menampung kader-kader politik penguasa atau rezim. Akibat dari intervensi yang begitu kuat dari partai politik terhadap birokrasi, dengan berbagai akibat yang terindikasikan di atas, menyebabkan profesionalitas birokrasi dalam bekerja

menjadi tidak nampak secara optimal, bahkan cenderung buruk.

Birokrasi pada akhirnya dicap berkinerja buruk dan menimbulkan kesengsaraan bagi Masyarakat banyak karena uang yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok dan/atau golongan tertentu yang berkuasa. Birokrasi menjadi ladang bagi perburuan rente oleh oknum-oknum birokrat tersebut.

Dampak dari itu semua adalah hilangnya kepercayaan masyarakat (public untrust) terhadap birokrasi. Dengan kondisi birokrasi yang begitu kuat diintervensi oleh partai politik atau dengan kata lain hilangnya netralitas birokrasi pemerintah tersebut, mendorong tumbuhnya gerakan untuk mengupayakan netralitas birokrasi sebagaimana yang digagas oleh Weber dan juga para pemikir teori negara lainnya.

Dampaknya, birokrasi menjadi sangat berwarna, dan profesionalitas dalam bekerja menjadi jauh api dari panggung. Sebagai dampaknya, bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, kita dapat berkesimpulan bahwa birokrasi pemerintah hampir tidak pernah netral dalam arti yang sebenarnya, bahkan dari beberapa kajian dan penelitian menunjukkan bahwa dalam posisi tersebut, birokrasi pemerintahan kita telah gagal dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat (to serve

public), yang seharusnya menjadi ruhnya aktivitas dan tugas birokrasi.

Gerakan netralitas birokrasi ini, bila merujuk pada pemikiran Antlov dan Cederroth (1994, dalam Rozi, 2006) dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pemihakan birokrasi pada satu partai politik, dan ketidakpuasan-ketidakpuasan politik serta mengingatkan birokrasi bahwa keasyikan birokrasi bermain dalam politik pada titik tertentu akan menghasilkan birokrasi yang korup, tidak efisien, tidak profesional dan amoral.

Idealnya, menurut Gladden (1956: 17-18), dalam suatu negara dengan penerapan system pemerintahan yang demokratis, termasuk di Indonesia saat ini, birokrat harusnya melayani masyarakat umum atau "civil servants devote their lives to the service of community" (mengabdikan hidupnya untuk melayani masyarakat), bukan pada kepentingan kelompok tertentu yang bersifat sesaat.

Sekali pemerintah atau elit pejabat politik pemerintahan menentukan kebijakan, birokrat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut tanpa harus terpengaruh oleh kepentingan partai penguasa atau partai yang berposisi. Hal ini mempertegas kepada kita bahwa netralitas birokrasi yang dimaksud adalah birokrat dapat mengekspresikan keberpihakannya, tertuju pada sinergitas kerja dengan pejabat politik (formulasi kebijakan), tetapi bukan pada Ketika melaksanakan tugas-tugas birokrasi.

Netralitas birokrasi perlu dilakukan juga karena mempertimbangkan bahwa budaya masyarakat kita, adalah budaya paternalistic atau patrimonial yang selalu melayani pihak yang memiliki sumber daya ekonomi, sosial dan politik yang besar. Implikasinya adalah bahwa ketika dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, jika sedari awal netralitas birokrasi ini tidak ditegakkan maka birokrasi dalam praktiknya akan berpihak pada mereka, karena ada budaya seperti itu. Akibat lebih lanjut adalah bahwa keberpihakan yang bersifat sesaat dan untuk kepentingan sesaat dapat terus terjadi dalam birokrasi kita.

Dengan perkataan lain, bahwa birokrasi kita akan selalu tidak netral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam mengurus negara dan pelayanan kepada masyarakat. Implikasinya bahwa harapan masyarakat agar birokrasi pemerintahan itu bisa profesional dan melayani masyarakat secara berkualitas belum bisa terealisasikan dengan optimal.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas, untuk menciptakan birokrasi yang netral dan terpinggirkan dari kelindan politik praktis, adalah :

Pertama, dalam konteks reinventing government dan banishing bureaucracy, kemandirian menjadi salah satu parameter berhasil tidaknya birokrasi pemerintah menjalankan aktivitas, peran, fungsi, dan tugasnya.

Kedua, apabila birokrasi yang dipimpinnya memiliki leadership yang kuat, visioner, dan bervisi kerakyatan serta memiliki kemampuan manajerial yang baik. Kegagalan birokrasi pemerintah selama ini dalam melakukan kegiatan organisasional disebabkan oleh para pemimpin kita kurang memiliki kepemimpinan yang kuat, visioner, dan bervisi kepada rakyat.

Ketiga, birokrasi dengan struktur organisasi yang organik-adaptif. Struktur birokrasi yang sentralistik-mekanistik,

dianggap tidak applicable dalam lingkungan masyarakat yang menghendaki situasi yang demokratis, terkhusus dalam kaitannya dengan pembuatan keputusan mengenai permasalahan, kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Keempat, birokrasi yang responsibel dan mengoptimalkan kepuasan rakyat terhadap pelayanan public dan senantiasa menjaga jarak dengan kelindan politik praktis.

Daftar Pustaka

- Albrow, M., 1970, *Birokrasi* (terj.), M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Blau, P.M., & Marshal W. Meyer; 2000 (terj.), *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus, dkk, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Hariandja D.B.C., 2003, *Birokrasi Nan Pongah: Belajar dari Kegagalan Orde Baru*, Refleksi Sosial, Penerbit.
- Mas'oe'd, Mochtar, 1994, *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sutherland, Heather, 1983, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Thoha, M., 2003, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kebijakan Publik, Program Penguatan Simpul Demokrasi Kabupaten Malang*, Malang.